

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Komunikasi merupakan hal penting bagi manusia untuk menjalankan kehidupannya. Hal ini disebabkan karena manusia adalah makhluk sosial atau makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia sangat membutuhkan komunikasi untuk berinteraksi dengan manusia lainnya. Lebih tegas lagi, Gerald R. Miller dalam Mulyana (2015:68) mengatakan bahwa komunikasi dapat terjadi Ketika suatu sumber menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima.

Public Relations atau bisa dikenal dengan Hubungan Masyarakat (Humas) merupakan profesi yang sangat diminati dan dibutuhkan, baik oleh organisasi maupun perusahaan. Setiap organisasi atau perusahaan sangat membutuhkan Humas untuk melancarkan proses kegiatan organisasi atau perusahaan tersebut. Memang tidak semua organisasi dan perusahaan mempunyai divisi humas secara tersendiri, namun kebanyakan organisasi dan perusahaan mengelompokkan bagian Humas kedalam divisi atau bagian tertentu, seperti divisi marketing dan divisi sekretaris perusahaan.

Keberhasilan pelaksanaan pelayanan publik tidak terlepas dari faktor komunikasi. Hasil penelitian oleh Hardiyansyah (2011:238) bahwa komunikasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Program atau tugas yang dibuat pemerintah akan berjalan dengan baik dan lancar apabila mendapat dukungan dari publik atau masyarakat, instansi pemerintahan dalam hal ini melakukan sikap transparasi dalam memberikan informasi kepada publik, agar publik dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di pemerintahan dan program apa saja yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Sikap keterbukaan pada publik nantinya akan mendapat *feedback* dari masyarakat yang berguna untuk kelanjutan dalam pengembangan program lainnya yang telah dibuat dan diharapkan dapat menimbulkan rasa simpati serta partisipasi aktif dari publik terhadap program pemerintah. Informasi harus dikelola terlebih dahulu sebelum disebarkan, agar pesan yang disampaikan kepada masyarakat luas dapat diterima dengan baik. komunikasi publik adalah memberikan informasi yang akurat dan meningkatkan kepercayaan publik terbentuknya organisasi hubungan masyarakat (humas) di setiap kementerian dan lembaga pemerintahan. Pemerintah melalui humas dituntut beradaptasi atas perkembangan teknologi melalui pemanfaatan media sosial untuk menyebarluaskan informasi terkait perkembangan dan kebijakan pemerintah.

Media komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah cukup berperan dalam keberhasilan komunikasi publik. Media massa yang telah berkembang memberikan kemudahan bagi Lembaga Pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakat agar terwujudnya transparasi sistem pemerintahan, sehingga kesalah pahaman antar pemerintah dan masyarakat dapat diminimalisir. Guna mengoptimalkan teknologi informasi yang semakin berkembang, dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, memberikan perintah untuk membuat *Website* resmi pemerintah guna mewujudkan transparasi sistem pemerintah.

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah

daerah dimana dalam setiap kegiatannya selalu berhubungan dengan pembangunan dan pengembangan sistem informasi, pengembangan dan pemeliharaan jaringan komputer antar bidang, pengelolaan produksi informasi dan publikasi, pengelolaan dan pengembangan komunikasi publik, yang mana pada setiap kegiatan-kegiatan tersebut terbagi menjadi tiga bidang serta satu sekretariat dan dikepalai oleh kepala bidang dari setiap bidangnya.

Dipilihnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon khususnya Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik sebagai *Public Relations* Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam rangka mewujudkan transparansi pemerintahan, dalam hal ini mengelola informasi dan pemberitaan yang dipublikasikan melalui media massa dan media online yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi instansi atau organisasi. Pemberitaan positif dapat memberikan dampak yang baik bagi citra instansi atau organisasi dan dapat berdampak buruk bagi citra instansi atau organisasi apabila pemberitaan tersebut bersifat negatif, pemerintahan perlu mengelola dengan baik komunikasi yang nantinya akan diterima oleh publik. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis memberi judul “Peran bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas pada laporan akhir ini, yaitu:

- 1) Bagaimana peran Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon?
- 2) Apa saja hambatan dan solusi dalam bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik?

Tujuan

Pembuatan Laporan Akhir ini memiliki beberapa tujuan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari laporan akhir ini adalah:

- 1) Menjelaskan peran bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.
- 2) Menjelaskan hambatan dan solusi dalam bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik.

METODE

Lokasi dan Waktu

Lokasi pengumpulan data guna menyusun Laporan Akhir ini dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon terletak di Jalan Sunan Drajat, No.15 Sumber, Kecamatan Sumber, Cirebon, Jawa Barat 45611. Pengumpulan data dilakukan selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama dua bulan. Praktik Kerja Lapangan (PKL) terhitung mulai 1 Maret 2021 hingga 5 Mei 2021 yang dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 08:00-16.00 WIB.